

Formulasi Kebijakan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Perubahan Sosial

Nurul Yakin
STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Indonesia
nurul10yakin@gmail.com

Abstrak

Pendidikan karakter adalah suatu upaya untuk menginternalisasikan karakter bangsa pada siswa berdasarkan nilai dan norma luhur yang ada di masyarakat. Untuk dapat merealisasikan sistem pendidikan karakter yang kuat, diperlukan rumusan kebijakan yang baik. Formulasi kebijakan perlu mengakomodir semua hal terutama yang berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat. Pembahasan ini berupaya untuk mengungkap bagaimana seharusnya kebijakan pendidikan karakter itu dilakukan, serta bagaimana relevansi dan kontekstualisasinya terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan karakter yang berparadigma perubahan sosial harus didasarkan pada Pancasila, Bhinika Tunggal Ika serta sistem perundang-undangan yang berlaku. Kebudayaan, tradisi, dan *local wisdom* bangsa Indonesia hendanya menjadi pilar rujukan dalam konteks rumusan kebijakan sebab ia menjadi bagian yang melekat dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang sangat penting sebab perubahan sosial masyarakat yang lebih baik sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat, sementara kualitas masyarakat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diberikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Karakter, Perubahan Sosial

Abstract

Character education is an effort to internalize the nation's character in students based on noble values and norms that exist in society. To be able to realize a strong character education system, a good policy formulation is needed. Policy formulation needs to accommodate all matters, especially those related to community social behavior. This discussion seeks to reveal how the character education policy should be carried out, as well as how relevant and contextualized it is to changes that occur in the social environment. The research method used in this research is a qualitative approach with library research type. This study concludes that character education policies with the paradigm of social change must be based on Pancasila, Bhinika Tunggal Ika and the applicable legal system. Culture, tradition, and local wisdom of the Indonesian nation should become a reference pillar in the context of policy formulation because it is an inherent part of character education. Character education is very important because social change for the better is strongly influenced by the quality of society, while the quality of society is influenced by the pattern of education provided.

Keywords: Policy, Character Education, Social Change

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya sistematis untuk melakukan perubahan signifikan terhadap perilaku individu. Perilaku yang diharapkan tentu ke arah yang lebih baik sebab hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dari uraian ini tentu kita sedikit memperoleh kesimpulan bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, non diskriminasi, kesetaraan, dan mengacu kepada paradigma perubahan sosial masyarakat.

Darmiyati menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menghasilkan *output* yang berkualitas, memiliki karakter yang kuat dan mampu melahirkan peserta didik yang humanis.¹ Artinya pendidikan yang diharapkan kita saat ini adalah pendidikan yang mampu mencetak karakter bangsa yang kuat, yang tidak hanya pendidikan yang hanya sekedar mengorientasikan dirinya kepada *transfer of knowledge*, melainkan mampu untuk merepresentasikan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang santun, berintegritas yang berdasarkan dengan moralitas yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar-dasar dan norma-norma yang berlaku dalam sosial masyarakat.

Untuk dapat merealisasikan sistem pendidikan karakter yang kuat, perlu untuk dirumuskannya suatu kebijakan yang baik. Formulasi kebijakan tersebut perlu mengakomodir setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek terutama dalam hal perilaku sosial masyarakat. Pembahasan tentang pendidikan karakter jika dilihat dari kacamata perubahan sosial memang jarang sekali kita temukan. Pembahasan keduanya seringkali terpisah sehingga muncul suatu persepsi bahwa antara pendidikan karakter dan aspek perubahan sosial tidak memiliki keterkaitan, padahal jika kita mau lebih teliti maka kita temukan suatu kesamaan point mendasar dari keduanya, yaitu dalam konteks pendidikan sama-sama berubaya untuk melakukan perubahan mendasar perilaku manusia.

Secara umum kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 UU RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Kemendiknas Tahun 2010-2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter,²

¹ Darmiati Zuchdi, *Pendidikan Karakter (Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), 5.

² UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 UU RI No. 17 Tahun 2007.

serta Surat Edaran Kemendiknas No. 1860/C/TU/2011 tentang Upacara Tahun Ajaran Baru dan Pendidikan Karakter.³ Pada undang-undangan ini secara khusus dijelaskan bagaimana implimentasi dari pendidikan karakter, serta bagaimana model pendidikan di sekolah harus dilakukan.

Kementerian Pendidikan Nasional dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya adalah suatu upaya untuk dapat mengembangkan karakter bangsa pada siswa, hal ini dilakukan agar supaya siswa dapat memiliki karakter kuat yang tertanam dalam dirinya sehingga dapat mengaplikasikan nilai karakter tersebut dalam dunia nyata sebagai bagian dari anggota masyarakat.⁴ Dari uraian ini nampak sekali bahwa orientasi dari pendidikan karakter adalah internalisasi nilai karakter kepada siswa dengan harapan mereka dapat mengamalkannya pada tataran dunia nyata di lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, pendidikan karakter memiliki kontribusi besar dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih maju.⁵ Artinya pendidikan yang baik akan turut mempengaruhi kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itulah penting untuk dilakukannya formulasi kebijakan tentang pendidikan karakter yang didasarkan pada perubahan sosial dalam masyarakat. Pembahasan ini akan berupaya untuk mengungkap bagaimana seharusnya kebijakan pendidikan karakter itu harus dilakukan, serta bagaimana relevansi dan kontekstualisasinya terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pendahulu yang menjelaskan tentang formulasi kebijakan pendidikan karakter yang perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu; *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Firda Halawati dan Dicky Fauzi Firdaus yang berjudul Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Siswa MI.⁶ penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang sangat

³ Surat Edaran (SE) Kemendiknas No. 1860/C/TU/2011.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Karakter Teori & Aplikasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 4.

⁵ Ryan Indy, dkk, "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara", Vol. 12, No. 4 (Oktober-Desember, 2019), 3.

⁶ Firda Halawati dan Dicky Fauzi Firdaus, Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Siswa MI, *Jurnal EHDJ: Education and Human Development Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (2020), 51.

signifikan antara pengaruh pendidikan karakter terhadap perilaku siswa MI. Pengaruhnya menunjukkan prosentasi yang cukup signifikan dengan berada di angka 52,6%.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amanatus Shobroh yang berjudul Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Kejujuran Siswa MTs N Galur Kulon Progo Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara pengaruh pendidikan karakter terhadap pembentukan kejujuran siswa. Adapun pengaruhnya menunjukkan prosentasi yang cukup signifikan dengan berada di angka 76%. *Ketiga*, penelitian Tesis yang dilakukan Revila Susanti yang berjudul Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa Pada Materi Kebijakan Moneter Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu memperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pendidikan karakter terhadap Perilaku Siswa Pada Materi Kebijakan Moneter.⁷

Bedasarkan uraian dan hasil penelitian di atas, penting sekali adanya pembahasan khusus berkenaan dengan kajian konseptual tentang formulasi kebijakan tentang pendidikan karakter yang didasarkan pada perubahan sosial dalam masyarakat. Pembahasan ini akan berupaya untuk mengungkap bagaimana seharusnya kebijakan pendidikan karakter itu harus dilakukan, serta bagaimana relevansi dan kontekstualisasinya terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat. Dari pertanyaan inilah persoalan tersebut akan dijawab, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah pembahasan yang akurat dan representatif terhadap kajian tentang kebijakan pendidikan karakter dalam prespektif perubahan sosial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* sehingga sumber data yang diperoleh yaitu dari teori-teori tentang kebijakan pendidikan karakter dan teori perubahan sosial sebagai sumber primer dan dari literatur-literatur ilmiah.⁸ Kajian ini berupaya untuk mengkaji tentang bagaimana seharusnya kebijakan pendidikan karakter itu diformulasikan yang didasarkan pada kacamata teori perubahan sosial. Kajian dilakukan dengan proses penelaahan terhadap beberapa sumber keilmuan guna mendapatkan pemahaman yang

⁷ Rosdiana “Pengaruh Evaluasi Belajar terhadap Capaian Kompetensi Penguasaan Pengetahuan pada PAK di SMP 3 Kalumpang”, *Tesis Sekolah Tinggi Theologia Jaffray* Makasar (2018), 7.

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

konstruktif dan luas demi memperoleh konsep ilmu pengetahuan yang substantif dan konperhensif.

Pendidikan Karakter dalam Konteks Perubahan Sosial

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan merupakan upaya sistematis dalam rangka pembentukan masarakat yang dinamis sehingga diterima oleh lingkungannya. Pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan kepribadian diri dan pengembangan potensi seorang individu agar dapat berkembang secara optimal, sehingga potensi dasar yang telah dianugrahi oleh tuhan dapat sejalan dengan kebutuhannya sebagai makhluk individu dan kebutuhan lingkungannya sebagai makhluk sosial.

Dalam realisasi konsep pendidikan di sekolah, seorang pendidik hendaknya dapat membantu pengembangan diri peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkualitas yaitu memiliki pengetahuan, sikap, dan serangkaian *skill* yang mereka butuhkan dalam mengarungi kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting sebab seorang individu hendaknya dapat melakukan aktualisasi dan adaptasi dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, hal ini karena perubahan sosial pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat, dan kualitas masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang mereka dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal.⁹

Berdasarkan pada uraian di atas kita dapat melihat bahwa peranan lembaga pendidikan menjadi sangat penting sebab ia akan sangat mempengaruhi kualitas dari masyarakat itu sendiri yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi kualitas perubahan sosial yang terjadi pada lingkungannya. Lembaga pendidikan harus peka terhadap segala fenomena sosial masyarakat, sehingga pola pendidikan yang diberikan harus mampu mencetak anak yang memiliki aspek intelektual yang kuat, mampu berikir kritis, memiliki daya analisis yang kuat terhadap berbagai fenomena dan dinamika prubahan sosial masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan adalah sebuah institusi yang memiliki tujuan untuk dapat memelihara dan menjaga warisan budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Kendatipun demikian, perubahan sosial yang terjadi

⁹ Abdul Halim, dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter* (Jambi: Wade Group, 2019), 56.

kadangkala tidak tersetruktur dan teratur sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan kebayaan masyarakat. Munculnya perubahan sosial dalam bidang teknologi dapat menyebabkan adanya ke-tidak stabilan sosial sehingga dapat menciptakan kemiskinan, dan tindakan kriminalitas yang semakin luas, hal ini adalah contoh dari adanya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh adanya perubahan sistem sosial masyarakat yang tidak dapat dipreventifikasi.¹⁰ Berdasarkan hal ini pendidikan sejatinya memiliki “PR” dan tugas rumah yang tidak sederhana, ia harus mampu untuk menganalisa kebutuhan masyarakat, menyiapkannya serta mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang bisa jadi dapat terjadi secara tiba-tiba dan mendesak. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pendidikan yang baik dan didukung oleh adanya kebijakan-kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial dalam sistem bermasyarakat.

Persoalan perubahan sosial adalah persoalan bagaimana dan sampai mana kita dapat menerima perubahan tersebut. Sedangkan persoalan dinamika perubahan sosial yang negatif merupakan tugas pendidikan sebab hanya dengan pendidikanlah perubahan sosial masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik. Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan perbaikan sistem dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, melalui transformasi dan internalisasi nilai-nilai luhur yang dilandasi oleh filsafat berbangsa dan bernegara.

Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh A. Zaeny menegaskan bahwa terdapat tiga tahap terjadinya perubahan sistem, fungsi dan struktur dalam perubahann sosial, meliputi:¹¹ *pertama*, Invensi: merupakan sebuah proses di mana masyarakat memahami dan menyadari sendiri bahwa merakalah yang menciptakan perubahan tersebut sehingga muncul berbagai perubahan yang dimaksud. *Kedua*, Diffusi: merupakan peroses penerimaan gagasan atau ide yang muncul dari pihak eksternal yang kemudian terkomunikasi dan terintegrasi dalam sistem kepercayaan masyarakat. *ketiga*, Konsekuensi: merupakan hasil/konsekuwensi dari adanya perubahan tersebut yang bisa jadi disebabkan oleh internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan sistem perubahan, faktor lembaga pendidikan menjadi sesuatu yang sangat urgen, di man ia tumbuh dan berkembang dalam upaya mentransformasi ilmu

¹⁰ Dyah Gandasari, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 143.

¹¹ A. Zaeny, “Transformasi Sosial Dan Gerakan Islam Di Indonesia”, *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, Nomor 2, (Juni, 2005), 155.

pengetahuan kepada generasi penerus bangsa agar dapat tangguh menghadapi perubahan, serta menciptakan perubahan dengan tangan mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Artinya adalah kualitas generasi muda dalam menciptakan dinamika perubahan positif tergantung pada aspek pendidikan yang mereka terima. Oleh karena itulah, lembaga pendidikan harus menjadi garda utama dalam mempersiapkan manusia-manusia yang tangguh sehingga dapat menciptakan perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik.

Pendidikan pada dasarnya suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran, bimbingan, serta arahan dalam rangka membantu pengembangan diri peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkualitas. Artinya adalah bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk bisa berperilaku adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini menjadi penting sebab seorang individu hendaknya dapat melakukan aktualisasi dan adaptasi dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, hal ini karena perubahan sosial pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas masyarakat, dan kualitas masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang mereka dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dalam konteks inilah penting untuk membangun paradigma pendidikan yang berasaskan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, hal ini harus dimulai dari bangunan dasar dan didukung oleh berbagai institusi-institusi lain seperti pemerintah, masyarakat, ataupun lembaga pendidikan itu sendiri.

Kebijakan Pendidikan Karakter

Kecerdasan dan keterampilan tidak akan ada artinya manakala tidak dilandasi oleh dimensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga pendidikan yang hanya didasari oleh dimensi kecerdasan dan keterampilan akan terasa hampa manakala mengabaikan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas. Kemajuan sebuah peradaban sejatinya tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa cerdasnya suatu masyarakat, melainkan juga dipengaruhi oleh seberapa kuat masyarakat tersebut memiliki karakter dan berpegang teguh kepada nilai dan norma agama serta sosial yang mereka miliki.¹²

Pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswa sesungguhnya tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab kepala sekolah, guru, dan semua elemen sekolah, melainkan orang tua juga memiliki porsi yang cukup besar sebab seorang anak lebih banyak

¹² Sri Suwartini, "Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan", *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 4, No. 1, (September, 2017), 220.

menghabiskan waktunya di rumah. Kendatipun demikian, sekolah memiliki peran yang sangat strategis karena sistem pendidikan di sekolah dilaksanakan secara lebih sistematis, terukur, dan terencana. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus mampu untuk mengoptimalkan waktu yang ada sehingga proses pendidikan yang dilakukank dapat berjalan secara baik dan tujuan pendidikan dapat terwujud secara maksimal.

Proses pendidikan yang di tempuh di sekolah membutuhkan waktu yang relatif lama sebab pembentukan watak dan karakter siswa tidak semudah apa yang difikirkan. Pola pendidikan karakter harus dilakukan secara kontinu sebab kebiasaan anak dalam melakukan perilaku yang baik di sekolah perlu untuk selalu dipupuk, dibiasakan, dan dipantau oleh seoran pendidik.¹³ Malalui pemberian pelajaran, pembiasaan, *modelling* dari pendidik, serta kerangkaian kegiatan yang ada di sekolah diharapkan dapat membantu siswa agar dapat memiliki kebiasaan yang baik sehingga kebiasaan tersebut menjadi sikap asli, serta menjadi kepribadian yang melekat pada diri seorang anak.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa selain guru, orang tua memiliki porsi yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter dan watak seorang anak, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an Surah Luqman (31) ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Selain itu, surat tersebut diperkuat oleh surat yang sama pada ayat yang ke 17 yang berbunyi:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾



Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

¹³ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 143.

Terdapat beberapa Undang-undang dan Peraturan yang melandasi dan mengatur pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter di satuan pengelola pendidikan formal, antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;¹⁴
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;¹⁵
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;¹⁶
 - a. Pasal 2 bahwa PPK memiliki tujuan: a). membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b). mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c). merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
 - b. Pasal 3 PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Dengan demikian, kebijakan tentang pendidikan karakter di Indonesia telah ditetapkan dengan sangat kokoh dengan didasarkan pada Undang-Undang dan perangkat sistem kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter menjadi sangat urgen dan menjadi fokus pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Terjadinya fenomena krisis integritas bangsa di negara ini menjadi bagian yang tidak dapat

¹⁴ Lampiran UU SISDIKNAS No. 20, Tahun 2003.

¹⁵ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹⁶ Zakaria, "Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Era Industri", *Jurnal Dirasah*, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2021), 4.

dipisahkan oleh lemahnya karakter bangsa saat ini sehingga penguatan karakter bangsa melalui pendidikan karakter menjadi keharusan yang tidak boleh diabaikan.

Formulasi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Pada Perubahan Sosial

Dalam prespektif pendidikan Islam, pendidikan karakter pada dasarnya merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kepribadian, sikap, dan keadaan manusia. Untuk dapat lebih memahami konsep ini, ada baiknya kita melihat al-Qur'an Surah Ali Imron ayat ke-104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Ayat di atas selanjutnya diperkuat oleh hadis yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: *Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. (HR Al-Baihaqi dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu)*

Ayat dan hadis di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa hakikat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini memiliki makna bahwa diutusnya Rosulullah Muhammad dalam rangka terciptanya tatanan perubahan sosial yang lebih baik. Akhlak memiliki dimensi moralitas yang kuat yang itu artinya bahwa pendidikan karakter menjadi unsur penting yang juga dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perubahan sosial yang leboh baik merupakan manifestasi dan konsekuensi dari pendidikan karakter yang diberikan kepada seorang anak. Oleh karena itulah, untuk melakukan perubahan sosial masyarakat perlu dilakukan upaya mendidik dengan model pendidikan yang berasaskan nilai-nilai karakter yang kuat.

Para Ulama'-ulama' terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan Imam Syafi'i mengungkapkan pentingnya pendidikan akhlak dan adab bagi seorang anak. Mereka meyakini bahwa akhlak dan adab memiliki keutamaan yang sangat besar bahkan melebihi derajat ilmu itu sendiri. Mayoritas para ulama' sepakat bahwa seorang siswa hendaknya terlebih dahulu mempelajari ilmu akhlak dan adab sebelum mempelajari ilmu

pengetahuan.¹⁷ Hal ini dipraktekkan oleh mereka dalam kehidupannya sehingga mereka lebih memilih mempelajari ilmu akhlak dan adab selama puluhan tahun sebelum memperdalam ilmu pengetahuan.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa pendidikan akhlak atau karakter memiliki kaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia demi terwujudnya perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik yaitu dari keadaan masyarakat yang awalnya dipenuhi dengan kebodohan menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, dan *rahmatan lil alamin*. Hal ini tentu tidak dapat teralisasi tanpa adanya aspek pendidikan yang beliau tanamkan dan ajarkan kepada para sahabat ketika itu.

Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, diperlukan upaya nyata dalam rangka reaktualisasi dan relevansi dengan konteks perubahan sosial pada masyarakat. Kebudayaan dan lokal wisdom yang berlaku di masyarakat harus juga turut menjadi pilar dalam pendidikan karakter di Indonesia sebab keduanya menjadi bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Dari uraian inilah kita dapat memperoleh pandangan bahwa kebijakan tentang pendidikan karakter harus lebih terbuka melihat fenomena perubahan sosial yang berlaku, sehingga kebijakan tersebut dapat berbicara banyak di tengah-tengah masyarakat serta dapat lebih aktual dalam melihat fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan.

Pendidikan karakter sosial pada dasarnya telah berakar dan terfilosofi pada falsafah hidup bangsa Indonesia. Ia telah lama berdiri kokoh semenjak para *founding father* kita mendirikan dan merumuskan edilogi negara. Kendatipun pada implimentasinya masih sangat minim, nilai-nilai karakter seperti solidaritas, loyalitas, keadilan, dan kebersamaan telah menjadi landasan bangsa ini dalam hidup bersosial. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika juga menjadi bangunan yang kokoh serta menjadi akar dan pondasi yang kuat dalam perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan karakter yang merasakan pada konteks perubahan sosial masyarakat.¹⁸ Berdasarkan uraian ini nampak sekali bahwa sejatinya rumusan dari kebijakan pendidikan karakter telah memiliki pondasi yang kuat sehingga pada tataran implimentasinya kebijakan tersebut

¹⁷ Sungkowo, "Konsep Pendidikan Akhlak (Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Barat)", *Nur El-Islam*, Vol. 1, Nomor 1, (April, 2014), 36.

¹⁸ Tetep, "Menggali Nilai-Nilai Karakter Sosial dalam Meneguhkan Kembali Jati Diri Ke-Bhineka-an Bangsa Indonesia, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 373.

dapat mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Kesimpulan

Kebijakan tentang pendidikan karakter sosial di Indonesia telah ditetapkan dengan sangat kokoh dengan didasarkan pada Undang-Undang dan perangkat sistem kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter menjadi sangat urgen dan menjadi fokus pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, diperlukan upaya nyata dalam rangka reaktualisasi dan relevansi dengan konteks perubahan sosial pada masyarakat. Kebudayaan dan lokal wisdom yang berlaku di masyarakat harus juga turut menjadi pilar dalam pendidikan karakter di Indonesia sebab keduanya menjadi bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan karakter sosial pada dasarnya telah berakar dan terfilosofi pada falsafah hidup bangsa Indonesia. Ia telah lama berdiri kokoh semenjak para *founding father* kita mendirikan dan merumuskan edilogi negara. Dengan demikian, rumusan dari kebijakan pendidikan karakter sosial telah memiliki pondasi yang kuat sehingga pada tataran implimentasinya kebijakan tersebut dapat mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Karakter Teori & Aplikasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 4.
- Gandasari, Dyah. dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Halawati, Firda dan Dicky Fauzi Firdaus, Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Siswa MI, *Junal EHDJ: Education and Human Development Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (2020).
- Halim, Abdul. dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter*. Jambi: Wade Group, 2019.
- Indy, Ryan, dkk, “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”, Vol. 12, No. 4 (Oktober-Desember, 2019).
- Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Lampiran UU SISDIKNAS No. 20, Tahun 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Rosdiana “Pengaruh Evaluasi Belajar terhadap Capaian Kompetensi Penguasaan Pengetahuan pada PAK di SMP 3 Kalumpang”, *Tesis Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makasar* (2018).
- Sungkowo, “Konsep Pendidikan Akhlak (Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Barat)”, *Nur El-Islam*, Vol. 1, Nomor 1, (April, 2014).
- Surat Edaran (SE) Kemendiknas No. 1860/C/TU/2011.
- Suwartini, Sri. “Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan”, *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 4, No. 1, (September, 2017).
- Tetep, “Menggali Nilai-Nilai Karakter Sosial dalam Meneguhkan Kembali Jati Diri Ke-Bhineka-an Bangsa Indonesia, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 373.
- UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 pasal 3 UU RI No. 17 Tahun 2007.
- Zaeny, A., “Transformasi Sosial Dan Gerakan Islam Di Indonesia”, *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, Nomor 2, (Juni, 2005), 155.

Zakaria, “Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Era Industri”, *Jurnal Dirasah*, Vol. 4, No. 1 (Februari, 2021).

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zuchdi, Darmiati. *Pendidikan Karakter (Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: UNY Press, 2012.